

**ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN TERHADAP KOMPONEN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023**

***KLASSEN TYPOLOGY ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX  
COMPONENTS IN BOGOR DISTRICT IN 2023***

**Dicky Adiyaksa**

Bappedalitbang

dickyadiyaksa1909@gmail.com

**ABSTRACT**

*Human development has evolved from the fulfillment of basic physical needs to comprehensive and sustainable well-being. The Human Development Index (HDI) has become an important tool for measuring quality of life and progress in various countries. This study aims to categorize areas per sub-district according to HDI components in Bogor Regency in 2023 to facilitate the prioritization of policy interventions. This study uses a quantitative design with secondary data from Bappedalitbang Bogor Regency and the Central Bureau of Statistics (BPS) for 2016-2022. The data was analyzed using the Klassen typology classification process or grouping of regions based on the human development index (HDI) with its forming components, namely average years of schooling (RLS), expected years of schooling (HLS), life expectancy (AHH), purchasing power parity (PPP) against the development index of each sub-district (IPK) with its forming variables, namely the education facility index (IFP), health facility index (IFK), and economic facility index (IFE). The results show that sub-districts in the West Bogor Regency region have lower HDI component values than the East Bogor Regency region, especially the PPP component. Based on the Klassen Typology that maps HDI with GPA, the number of sub-districts in quadrant III is still quite large (7-15 sub-districts) which indicates that health, education and economic facilities in these sub-districts are still lacking. Policy interventions should focus on improving education, health and economic infrastructure facilities, especially in sub-districts that have low HDI and GPA values, to reduce inequality and improve welfare.*

**Keywords:** *Human Development Index, Klassen Typology, Policy Recommendations.*

**ABSTRAK**

Pembangunan manusia telah mengalami evolusi dari pemenuhan kebutuhan fisik dasar hingga kesejahteraan menyeluruh dan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat penting untuk mengukur kualitas hidup dan kemajuan di berbagai negara. Studi ini bertujuan untuk kategorisasi wilayah per kecamatan menurut komponen IPM di Kabupaten Bogor tahun 2023 untuk memudahkan prioritas intervensi kebijakan.. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan data sekunder dari Bappedalitbang Kabupaten Bogor dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016-2022. Data dianalisis menggunakan tipologi Klassen proses klasifikasi atau pengelompokan wilayah berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan komponen pembentuknya yaitu rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), angka harapan hidup (AHH), purchasing power parity (PPP) terhadap indeks perkembangan masing-masing kecamatan (IPK) dengan variable pembentuknya yaitu indeks fasilitas pendidikan (IFP), indeks fasilitas Kesehatan (IFK), dan indeks fasilitas ekonomi (IFE). Hasil penelitian menunjukkan kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor Barat, memiliki nilai komponen IPM yang lebih rendah dibandingkan wilayah Kabupaten Bogor Timur, terutama komponen PPP. Berdasarkan Tipologi Klassen yang memetakan komponen IPM, jumlah kecamatan yang berada di kuadran III masih cukup banyak (7-15 kecamatan) yang menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada kecamatan tersebut masih kurang. Intervensi kebijakan harus difokuskan pada peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi terutama di kecamatan-kecamatan yang memiliki nilai IPM dan IPK rendah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Indeks Pembangunan Manusia, Tipologi Klassen, Rekomendasi Kebijakan.

## 1. PENDAHULUAN

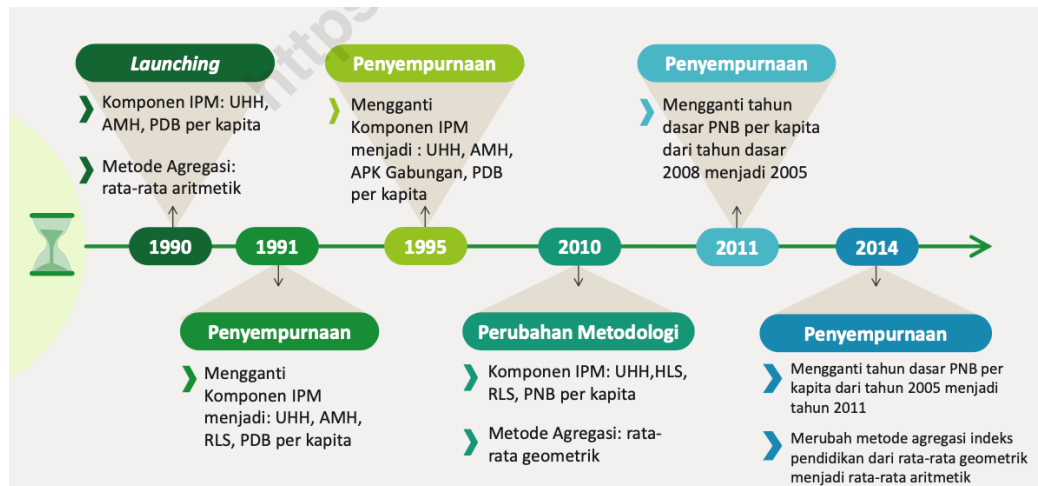
Konsep pembangunan manusia telah mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, dimulai dari pandangan kuno hingga pemikiran modern saat ini. Pada pandangan kuno, pembangunan manusia hanya berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Hal tersebut memiliki tujuan agar manusia dapat bertahan dan melanjutkan hidupnya (Sen, 1999). Pada abad pertengahan, pembangunan manusia lebih terfokus pada kemajuan spiritual dan moral dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat (Alatas, 1977). Pada abad pencerahan, pembangunan manusia lebih condong pada kemajuan intelektual dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan rasional. Pada abad modern awal, pembangunan manusia mulai terpusat pada kemajuan ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup manusia (Sen, 1999). Namun, saat ini pembangunan manusia semakin berkembang dan memperluas pandangannya untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan keadilan sosial (UNDP, 2022).

Perkembangan pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. Revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam cara manusia hidup dan bekerja, menjadi salah satu perubahan paling penting dalam sejarah pembangunan manusia. Perang dunia serta konflik internasional lainnya juga mempengaruhi perkembangan pembangunan manusia karena dampaknya terhadap kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya, dan kerugian manusia lainnya. Sementara itu, globalisasi tidak hanya membuka pasar dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi, tetapi juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin besar antara negara-negara maju dan berkembang. Perubahan iklim juga berperan besar dalam perkembangan pembangunan manusia karena menimbulkan ancaman-ancaman yang mengarah pada keberlangsungan hidup manusia terutama dalam konteks sumber daya alam, kesehatan manusia, dan keamanan pangan (Benería et al., 2016).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu negara (UNDP, 2023). IPM didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Salah satu manfaat utama dari IPM adalah adanya keterbandingan antarnegara dalam hal kemajuan pembangunan manusia (UNDP, 2023). Dengan membandingkan IPM antarnegara, perbedaan dalam kemajuan pembangunan manusia di seluruh dunia dapat dilihat dan dipahami dengan lebih mudah. Selain itu, IPM juga memungkinkan identifikasi masalah dan tantangan khusus yang dihadapi oleh negara tertentu dalam mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan perbedaan dan masalah tersebut, pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kemajuan pembangunan manusia di negara mereka.

Layaknya manusia yang selalu berkembang, begitu pula pengukuran IPM mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Telah terjadi lima kali penyempurnaan terhadap IPM sejak tahun 1990. Penyempurnaan signifikan terjadi pada tahun 2010 yang utamanya terkait indikator-indikator penyusun IPM, sedangkan tahun 2014 terjadi perubahan metode penghitungan. Jika digambarkan, penyempurnaan pengukuran IPM dapat diamati melalui Gambar 1.



Sumber: BPS, 2022

**Gambar 1.** Perkembangan Metodologi IPM oleh UNDP

Berdasarkan indikator *Human Development Index* (HDI) yang dipublikasikan PBB tahun 2022, rata-rata HDI dunia adalah 0,731, sementara Indonesia 0,707, berada pada urutan 111 dari 189 negara. HDI Indonesia meningkat 0,003 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun PBB menggolongkan Indonesia termasuk kelompok tinggi (0,7 – 0,8), namun jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN masih berada dibawah Singapura (9), Brunei (45), Malaysia (61), Thailand (77), dan Filipina (106). Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk terus berupaya meningkatkan HDI tersebut melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Pada tahun 2022, IPM Indonesia mencapai 72,91 meningkat sebesar 0,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia Indonesia masih berada pada level tinggi, berada pada kisaran antara  $70 \leq \text{IPM} < 80$ . IPM Jawa Barat pada tahun 2022 menempati urutan 10 dari semua provinsi, posisi tersebut tidak mengalami perubahan dari 5 tahun sebelumnya. Kualitas hidup masyarakat Jawa Barat mengalami peningkatan, yang nampak dari meningkatnya IPM. Pada tahun 2022, IPM Jawa Barat sebesar 73,12 meningkat 0,92 poin dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 72,45. Perkembangan IPM Jawa Barat selama kurun waktu 2010 – 2022 mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 berada di atas rata-rata IPM nasional. Berdasarkan kontribusi indikator komponen IPM, maka Indeks Umur Harapan Hidup saat Lahir (AHH) merupakan yang tertinggi, kemudian Pengeluaran riil per kapita per tahun, Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS), dan terendah indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Kabupaten Bogor tergolong kelompok kuadran IV menurut tipologi Klassen berdasarkan Angka IPM dan pertumbuhan IPM tahun 2022. Kuadran IV merupakan wilayah yang memiliki angka IPM dan pertumbuhan IPM yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor juga tergolong kuadran IV untuk tipologi berdasarkan Angka IPM dan Indeks Kesehatan, yaitu wilayah yang memiliki angka IPM dan indeks kesehatan yang lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Demikian pula halnya dengan tipologi berdasarkan angka IPM dan Indeks Pendidikan, Kabupaten Bogor termasuk kuadran IV, yaitu wilayah dengan angka IPM dan Indeks Pendidikan yang lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Hal yang sama juga untuk tipologi berdasarkan angka IPM dan Indeks Pengeluaran, Kabupaten Bogor termasuk kuadran IV, yaitu wilayah dengan yang memiliki angka IPM dan Indeks Pengeluaran yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan gambaran keempat tipologi tersebut, memperlihatkan bahwa Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan semua indikator komponen IPM berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat, sehingga harus menjadi perhatian khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia melalui kebijakan dan program yang lebih terarah dan efektif. Oleh karenanya, diperlukan kajian terhadap komponen penyusun IPM di Kabupaten Bogor sehingga dapat diketahui kategorisasi per kecamatan untuk memudahkan pencirian wilayah-wilayah mana saja di Kabupaten Bogor yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan intervensi kebijakan.

Studi terdahulu terkait analisis IPM dengan pendekatan Tipologi Klassen menggunakan variabel dan metode analisis gabungan. Penelitian Lumbantoruan dan Hidayat (2014) berfokus pada provinsi di Indonesia dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM yang menggunakan metode analisis kuantitatif dengan data panel serta analisis Tipologi Klassen dan uji kointegrasi untuk melihat pola hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan IPM. Sementara itu, penelitian oleh Firdamayanti dan Prabowo (2021) mengkaji ketimpangan pendapatan dan IPM di kabupaten/kota di Jawa Timur menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan Uji Kausalitas Granger. Penelitian oleh Nadia dan Riyanto (2023) serta Muzdalifa dan Haryatiningsih (2021) juga menggunakan Tipologi Klassen, tetapi dengan fokus pada kabupaten/kota di Bali dan provinsi di Indonesia, dengan variabel yang mencakup IPM, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan.

Persamaan penelitian saat ini dengan studi terdahulu terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan Tipologi Klassen untuk mengkategorisasi wilayah. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus penelitian. Penelitian saat ini secara khusus menguraikan komponen pembentuk IPM, yaitu *k* rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), angka harapan hidup (AHH), *purchasing power parity* (PPP), serta indeks perkembangan masing-masing kecamatan (IPK) dengan variabel pembentuknya seperti indeks fasilitas pendidikan (IFP), indeks fasilitas kesehatan (IFK), dan indeks fasilitas ekonomi (IFE). Variabel tersebut belum diuraikan secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Analisis mendalam terhadap komponen IPM tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dan komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di tingkat kecamatan. Hal ini memungkinkan identifikasi masalah dan potensi spesifik di setiap

kecamatan, sehingga kebijakan dan intervensi pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan menggunakan metode Tipologi Klassen, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama yaitu: “Bagaimana kategorisasi wilayah per kecamatan menurut komponen IPM di Kabupaten Bogor tahun 2023 dengan Tipologi Klassen?”

## **2. METODE PENELITIAN**

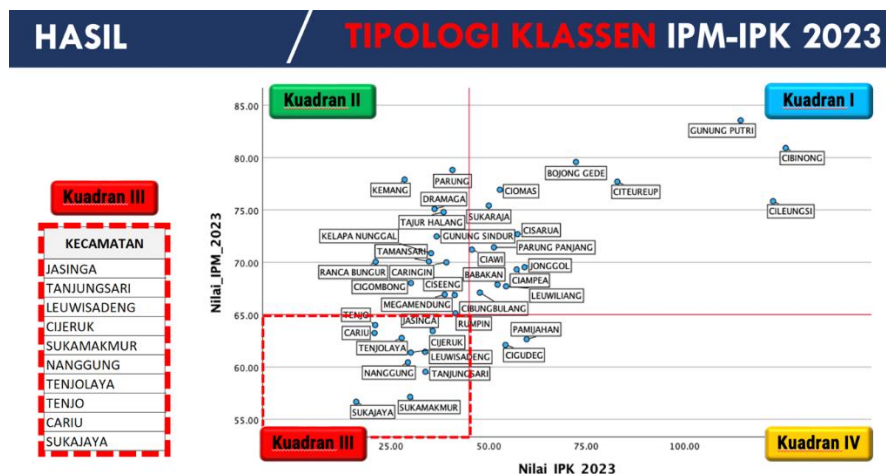
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis IPM di Kabupaten Bogor, dengan fokus pada kontribusi indikator komponen IPM di setiap kecamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Bappedalitbang Kabupaten Bogor (Laporan IPM Tahun 2023), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor (Kabupaten Bogor dalam Angka tahun 2024), serta studi literatur terkait IPM dengan metode Tipologi Klassen.

Metode analisis yang digunakan yaitu Tipologi Klassen untuk mengkategorisasikan unit-unit wilayah (level kecamatan) guna memudahkan dalam pengelolaan wilayah serta merumuskan rekomendasi kebijakan/rencana/program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah. Analisis tipologi wilayah (menggunakan tipologi klassen) adalah proses klasifikasi atau pengelompokan wilayah berdasarkan serangkaian karakteristik atau variabel tertentu yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) dengan komponen pembentuknya yaitu rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), angka harapan hidup (AHH), purchasing power parity (PPP) terhadap indeks perkembangan masing-masing kecamatan (IPK) dengan variable pembentuknya yaitu indeks fasilitas pendidikan (IFP), indeks fasilitas Kesehatan (IFK), dan indeks fasilitas ekonomi (IFE). Tipologi wilayah menggunakan tipologi klassen bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan nilai IPM yang dibandingkan dengan sifat-sifat perkembangan masing-masing kecamatan dan dapat digunakan untuk memahami dinamika spasial dan merumuskan kebijakan atau strategi pengembangan wilayah kedepannya. Analisis ini dapat mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Adapun penjelasan tipologi Klassen yang dibagi menjadi kedalam 4 kuadran yaitu sebagai berikut:

- a. Kuadran I menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai IPM, RLS, HLS, AHH, dan PPP diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IPK, IFP, IFK, dan IFE diatas rata-rata Kabupaten Bogor.
- b. Kuadran II menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai IPM, RLS, HLS, AHH, dan PPP diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IPK, IFP, IFK, dan IFE dibawah rata-rata Kabupaten Bogor.
- c. Kuadran III menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai IPM, RLS, HLS, AHH, dan PPP dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IPK, IFP, IFK, dan IFE diatas rata-rata Kabupaten Bogor.
- d. Kuadran IV menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai IPM, RLS, HLS, AHH, dan PPP dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IPK, IFP, IFK, dan IFE dibawah rata-rata Kabupaten Bogor.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Tipologi Klassen untuk IPM-IPK Kabupaten Bogor Tahun 2023



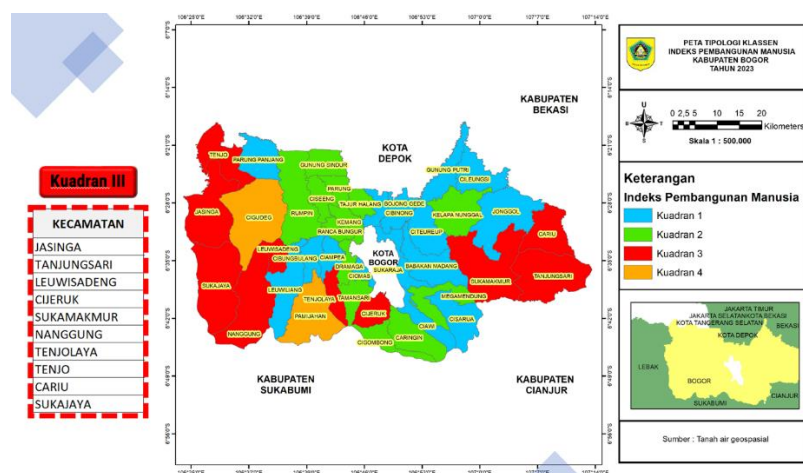
Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 2.** Tipologi Klassen IPM dengan IPK tahun 2023

Analisis tipologi wilayah dengan menggunakan tipologi Klassen pada variable IPM dengan IPK digunakan untuk mengkategorisasikan unit-unit wilayah (level kecamatan) untuk memudahkan pencirian wilayah-wilayah mana saja di Kabupaten Bogor yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan intervensi kebijakan, yaitu wilayah-wilayah yang cenderung memiliki nilai IPM rendah (dibawah rata-rata agregat) dan nilai IPK rendah (dibawah rata-rata agregat). Berdasarkan gambar tipologi Klassen IPM-IPK tahun 2023 didapatkan bahwa Kecamatan-Kecamatan yang berada pada kuadran I, II, III, dan IV yaitu sebagai berikut:

- Kuadran I menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai IPM diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IPK diatas rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Cibinong, Gunung Putri, Bojong Gede, Cileungsi, Citeureup, Ciomas, Sukaraja, Cisarua, Parung Panjang, Ciawi, Cibungbulang, Leuwiliang, Jonggol, dan Ciampea.
- Kuadran II menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai IPM diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IPK dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Parung, Kemang, Dramaga, Tajur Halang, Gunung Sindur, Kelapa Nunggal, Tamansari, Rancabungur, Caringin, Cigombong, Ciseeng, Megamendung, Rumpin.
- Kuadran III menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai IPM dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IPK dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Tenjo, Cariu, Tenjolaya, Nanggung, Jasinga, Cijeruk, Leuwisadeng, Tanjungsari, Sukajaya, dan Sukamakmur.
- Kuadran IV menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai IPM dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IPK diatas rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Pamijahan, dan Cigudeg.

Kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam kuadran III artinya memiliki nilai IPM dan IPK dibawah rata-rata Kabupaten Bogor sehingga membutuhkan intervensi khusus. IPM menilai kesejahteraan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Sementara itu, IPK mungkin mencakup lebih banyak dimensi yang terkait dengan perkembangan kecamatan, seperti infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik. Pada aspek pendidikan, keduanya bersama-sama memberikan gambaran holistik tentang kondisi wilayah. Tingkat pendidikan yang tinggi dan peluang ekonomi yang baik dapat mempengaruhi baik nilai IPM maupun IPK. Wilayah dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih produktif dan sehat, serta dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal. Pada aspek kesehatan dan infrastruktur kedua indeks memperhitungkan angka harapan hidup dan IPK memperhitungkan infrastruktur (aksesibilitas) dan jumlah pelayanan kesehatan. Pada aspek ekonomi, kedua indeks mempertimbangkan aspek pendapatan. IPM mengukur total pengeluaran per kapita, sementara IPK mencakup informasi tentang distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan, atau kesenjangan ekonomi, aksesibilitas ke pelayanan ekonomi, serta jumlah fasilitas ekonomi. Distribusi pendapatan yang adil dapat menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan berdaya.



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 3.** Pemetaan Tipologi Klassen IPM dengan IPK tahun 2023

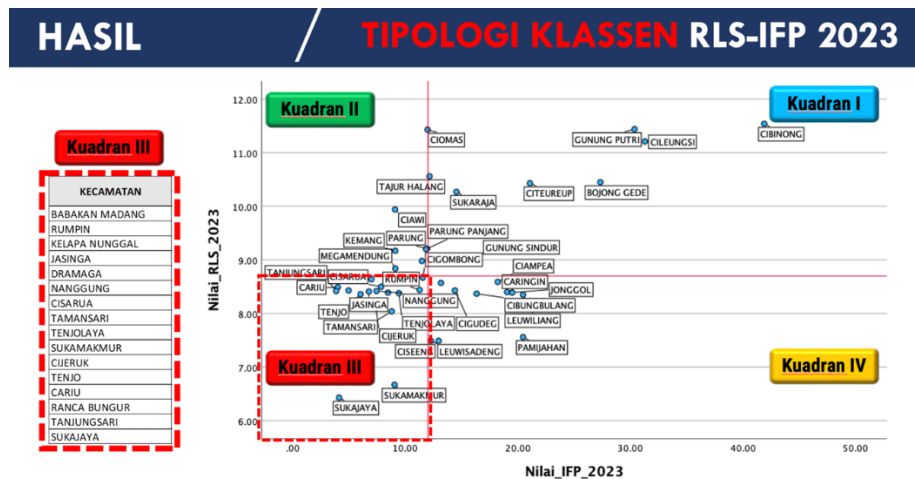
### 3.2. Tipologi Klassen untuk RLS-IFP Kabupaten Bogor Tahun 2023

Analisis tipologi wilayah dengan menggunakan tipologi Klassen pada variable RLS dengan IFP digunakan untuk mengkategorisasikan unit-unit wilayah (level kecamatan) untuk memudahkan pencirian wilayah-wilayah mana saja di Kabupaten Bogor yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan intervensi kebijakan terkait bidang pendidikan, yaitu wilayah-wilayah yang cenderung memiliki nilai RLS rendah (dibawah rata-rata agregat) dan nilai IFP rendah (dibawah rata-rata agregat). Berdasarkan gambar tipologi Klassen RLS-IFP tahun 2023 didapatkan bahwa Kecamatan-Kecamatan yang berada pada kuadran I, II, III, dan IV yaitu sebagai berikut:

- a. Kuadran I menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai RLS diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFP diatas rata-rata Kabupaten Bogor



- yaitu diantaranya: Cibinong, Gunung Putri, Bojong Gede, Cileungsi, Citeureup, Ciomas, Sukaraja, Parung Panjang, Gunung Sindur.
- Kuadran II menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai RLS diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFP dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Parung, Kemang, Tajurhalang, Megamendung, dan Cigombong.
  - Kuadran III menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai RLS dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFP dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Tenjo, Cariu, Tenjolaya, Jasinga, Cijeruk, Tanjungsari, Sukajaya, Rancabungur, Tamansari, Cisarua, Dramaga, Kelapanunggal, Rumpin, Babakan Madang, dan Sukamakmur.
  - Kuadran IV menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai RLS dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFP diatas rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Pamijahan, Leuwiliang, Cbungbulang, Jonggol, Caringin, Ciampea, Cigudeg, Nanggung, Leuwisadeng.



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 4.** Tipologi Klassen RLS dengan IFP tahun 2023

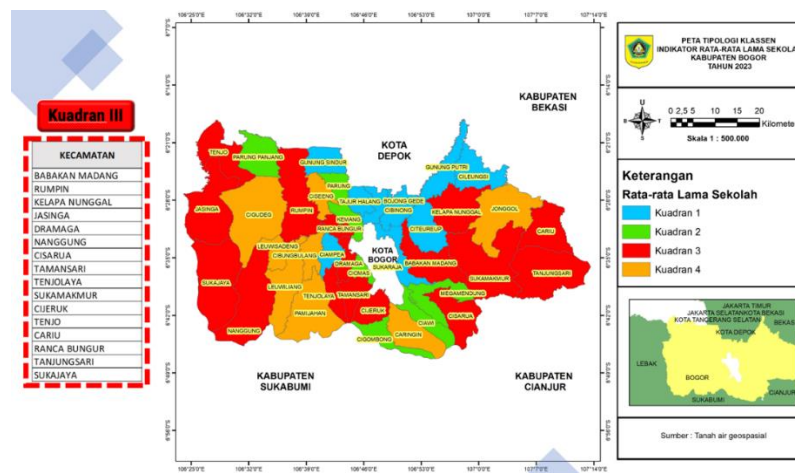
Indeks Fasilitas Pendidikan mencakup aspek fisik seperti jumlah dan kualitas bangunan sekolah, ketersediaan fasilitas belajar, dan aksesibilitas terhadap pendidikan. Rata-rata lama sekolah dapat mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap kesempatan pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi tingkat partisipasi dan aksesibilitas pendidikan. Indeks Fasilitas Pendidikan dapat memberikan informasi tentang sejauh mana fasilitas pendidikan tersebar merata di suatu wilayah, menghindari ketidaksetaraan dalam aksesibilitas dan rata-rata lama sekolah juga dapat mencerminkan tingkat kesetaraan dalam akses pendidikan. Ketika rata-rata lama sekolah tinggi di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor, hal ini menunjukkan adanya kesetaraan akses pendidikan.

Rata-rata lama sekolah memiliki kaitan erat dengan indeks fasilitas pendidikan, di mana tingkat aksesibilitas dan kualitas fasilitas pendidikan dapat memengaruhi durasi dan efektivitas proses pembelajaran. Fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan laboratorium yang baik di semua jenjang pendidikan, dapat meningkatkan motivasi siswa dan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan indeks



fasilitas pendidikan dapat berkontribusi positif terhadap rata-rata lama sekolah, karena lingkungan belajar yang baik mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dapat menjadi hambatan bagi siswa dan dapat berdampak negatif pada rata-rata lama sekolah, menghambat potensi pengembangan sumber daya manusia di suatu wilayah.

Dalam konteks ini, peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan peralatan pembelajaran, dan pemeliharaan fasilitas, dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperpanjang rata-rata lama sekolah.



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 5.** Pemetaan Tipologi Klassen RLS dengan IFP tahun 2023

Selain itu, indeks fasilitas pendidikan juga mencakup aspek aksesibilitas. Fasilitas yang mudah diakses oleh siswa, termasuk transportasi publik yang memadai dan jarak yang wajar antara rumah dan sekolah, dapat memberikan kontribusi positif terhadap partisipasi siswa dalam pendidikan. Aksesibilitas ini dapat mempengaruhi rata-rata lama sekolah, terutama di daerah-daerah yang mungkin menghadapi tantangan geografis atau ekonomi. Melalui upaya bersama dalam meningkatkan indeks fasilitas pendidikan, dapat diharapkan bahwa rata-rata lama sekolah akan meningkat, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Ini tidak hanya berdampak pada perkembangan individual siswa, tetapi juga pada kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

Dalam mengoptimalkan hubungan antara rata-rata lama sekolah dan indeks fasilitas pendidikan, perlu juga diperhatikan aspek kualitas pengajaran. Fasilitas yang memadai dapat menciptakan lingkungan fisik yang baik, tetapi kualitas pengajaran dan pendekatan pendidikan yang inovatif juga memegang peran kunci dalam memotivasi siswa untuk tetap berada dalam sistem pendidikan.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pelibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan penerapan metode pengajaran yang menarik dapat meningkatkan daya tarik pendidikan. Faktor-faktor ini berpotensi memperpanjang rata-rata lama sekolah dengan cara menciptakan pengalaman belajar yang lebih positif dan memotivasi siswa untuk mengejar

pendidikan lebih tinggi. Keterlibatan komunitas juga sangat penting. Melibatkan orang tua, guru, dan anggota masyarakat dalam upaya meningkatkan fasilitas pendidikan dan mendukung proses pembelajaran dapat menciptakan atmosfer pendidikan yang mendukung dan inklusif.

Dengan menyelaraskan perbaikan fasilitas, kualitas pengajaran, dan keterlibatan komunitas, dapat diharapkan bahwa rata-rata lama sekolah akan menjadi cermin dari lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan holistik siswa. Dengan demikian, masyarakat dapat meraih manfaat jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perkembangan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

**JUMLAH DAN JENIS FASILITAS PENDIDIKAN PADA 16 KECAMATAN (KUADRAN III)**

| KECAMATAN          | Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit) |           |            |            |            |            |           |           |           |           | Jumlah Total | Jumlah Jenis |
|--------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                    | TK                                 | RA/BA     | SD         | MI         | SMP        | MTs        | SMA       | MA        | SMK       | PT        |              |              |
| BABAKAN MADANG     | 21                                 | 9         | 56         | 15         | 15         | 7          | 11        | 2         | 6         | 6         | 148          | 10           |
| RUMPIN             | 10                                 | 3         | 69         | 19         | 14         | 14         | 5         | 3         | 4         | 0         | 141          | 9            |
| KELAPA NUNGGAL     | 35                                 | 3         | 36         | 23         | 15         | 7          | 2         | 1         | 7         | 0         | 129          | 9            |
| JASINGA            | 10                                 | 4         | 62         | 8          | 15         | 4          | 2         | 1         | 4         | 0         | 110          | 9            |
| DRAMAGA            | 33                                 | 6         | 41         | 4          | 12         | 2          | 4         | 0         | 5         | 2         | 109          | 9            |
| NANGGUNG           | 11                                 | 5         | 51         | 17         | 11         | 8          | 1         | 2         | 1         | 0         | 107          | 9            |
| CISARUA            | 16                                 | 10        | 36         | 13         | 12         | 4          | 5         | 0         | 7         | 1         | 104          | 9            |
| TAMANSARI          | 14                                 | 7         | 37         | 10         | 10         | 7          | 6         | 2         | 6         | 4         | 103          | 10           |
| TENJOLAYA          | 15                                 | 8         | 25         | 17         | 14         | 5          | 5         | 4         | 6         | 0         | 99           | 9            |
| SUKAMAKMUR         | 4                                  | 4         | 30         | 24         | 8          | 16         | 4         | 3         | 4         | 0         | 97           | 9            |
| CIJERUK            | 6                                  | 7         | 42         | 8          | 9          | 12         | 1         | 3         | 8         | 0         | 96           | 9            |
| TENJO              | 2                                  | 0         | 35         | 12         | 13         | 7          | 4         | 3         | 5         | 0         | 81           | 8            |
| CARIU              | 12                                 | 6         | 28         | 11         | 10         | 4          | 2         | 0         | 5         | 1         | 79           | 9            |
| RANCA BUNGUR       | 13                                 | 4         | 25         | 7          | 12         | 5          | 2         | 2         | 8         | 1         | 79           | 10           |
| TANJUNGSARI        | 4                                  | 10        | 26         | 15         | 9          | 3          | 3         | 1         | 3         | 0         | 74           | 9            |
| SUKAJAYA           | 1                                  | 0         | 29         | 13         | 9          | 8          | 2         | 1         | 5         | 0         | 68           | 8            |
| <b>Grand Total</b> | <b>207</b>                         | <b>86</b> | <b>628</b> | <b>216</b> | <b>188</b> | <b>113</b> | <b>59</b> | <b>28</b> | <b>84</b> | <b>15</b> | <b>1624</b>  | <b>10</b>    |

Keterangan:

RA/BA = Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (setara TK)  
MI = Madrasah Ibtidaiyah (setara SD)

MTs = Madrasah Tsanawiyah (setara SMP)  
MA = Madrasah Aliyah (setara SMA)

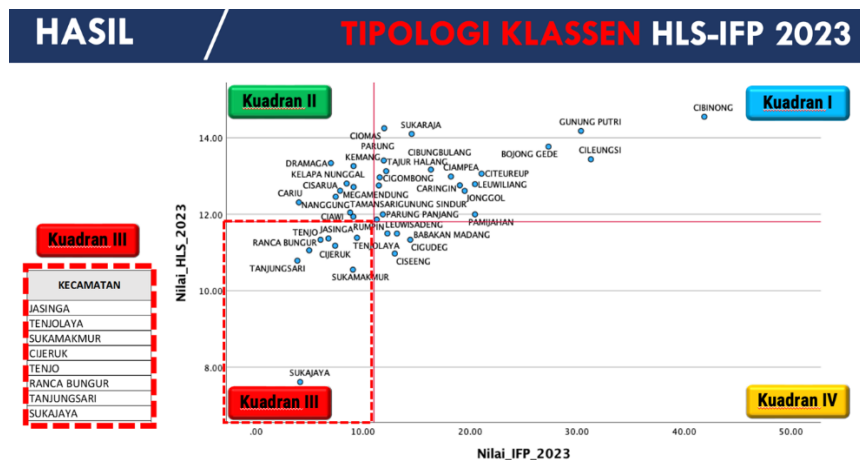


Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 6.** Jumlah dan Jenis Fasilitas Pendidikan pada 16 Kecamatan (Kuadran III)

Kurang lengkapnya jumlah dan jenis fasilitas pendidikan pada kecamatan-kecamatan pada gambar diatas (kuadran III) dapat memiliki dampak signifikan terhadap aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang terbatas atau kurang memadai dapat menurunkan motivasi siswa untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi ini dapat menyebabkan tingkat absensi yang tinggi dan pada akhirnya memperpendek rata-rata lama sekolah. Kurangnya fasilitas pendidikan juga dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat putus sekolah. Siswa mungkin lebih cenderung meninggalkan sekolah jika mereka merasa kurang didukung oleh fasilitas yang tidak memadai, seperti jarak yang jauh, kelas yang penuh sesak, kurangnya buku pelajaran, atau fasilitas olahraga yang terbatas. Kurangnya fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan yang minim atau laboratorium yang tidak memadai, dapat mempengaruhi kualitas pengajaran. Ini dapat merugikan kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran yang bervariasi dan menarik, sehingga mengurangi daya tarik pendidikan bagi siswa. Wilayah dengan fasilitas pendidikan yang kurang memadai cenderung mengalami ketidaksetaraan dalam rata-rata lama sekolah. Siswa di kecamatan tersebut mengalami kesulitan dalam mencapai standar pendidikan yang setara dengan kecamatan lain yang lebih baik fasilitasnya. Mengatasi kurang lengkapnya fasilitas pendidikan memerlukan investasi yang berkelanjutan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan. Ini termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas, serta penyediaan sumber daya pendukung untuk mendukung keberhasilan pendidikan siswa dalam jangka panjang.

### 3.3. Tipologi Klassen untuk HLS-IFP Kabupaten Bogor Tahun 2023



Sumber: Data Diolah, 2024

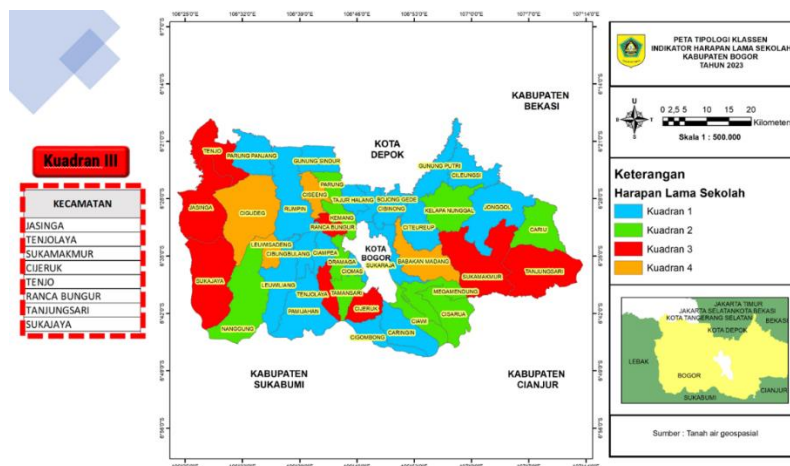
**Gambar 7.** Tipologi Klassen HLS dengan IFP tahun 2023

Analisis tipologi wilayah dengan menggunakan tipologi Klassen pada variable HLS dengan IFP digunakan untuk mengkategorisasikan unit-unit wilayah (level kecamatan) untuk memudahkan pencirian wilayah-wilayah mana saja di Kabupaten Bogor yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan intervensi kebijakan terkait bidang pendidikan, yaitu wilayah-wilayah yang cenderung memiliki nilai HLS rendah (dibawah rata-rata agregat) dan nilai IFP rendah (dibawah rata-rata agregat). Berdasarkan gambar tipologi Klassen HLS-IFP tahun 2023 didapatkan bahwa Kecamatan-Kecamatan yang berada pada kuadran I, II, III, dan IV yaitu sebagai berikut:

- Kuadran I menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai HLS diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFP diatas rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Cibinong, Gunung Putri, Bojong Gede, Cileungsi, Citeureup, Sukaraja, Ciomas, Parung, Kemang, Tajurhalang, Ciampea, Cigombong, Caringin, Jonggol, Parung Panjang, Gunung Sindur, Rumpin, Cibungbulang.
- Kuadran II menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai HLS diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFP dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Dramaga, Parung, Kelapanunggal, Cisarua, Cariu, Nanggung, Ciawi, Megamendung.
- Kuadran III menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai HLS dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFP dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Jasinga, Tanjungsari, Tenjo, Rancabungur, Tenjolaya, Cijeruk, Sukamakmur.
- Kuadran IV menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai HLS dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFP diatas rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Leuwisadeng, Babakan Madang, Cigudeg, Cisseng.

Harapan lama sekolah berkaitan erat dengan indeks fasilitas pendidikan, di mana tingkat harapan untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dapat diperoleh melalui ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas yang lengkap dan berkualitas dapat memberikan

dukungan yang diperlukan bagi siswa, meningkatkan motivasi mereka untuk mengejar pendidikan lebih lama dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, indeks fasilitas pendidikan yang baik dapat menjadi katalisator bagi peningkatan harapan individu terhadap masa depan pendidikan siswa.



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 8.** Pemetaan Tipologi Kelasn HLS dengan IFP tahun 2023

Keterkaitan antara harapan lama sekolah dan indeks fasilitas pendidikan juga tercermin dalam persepsi siswa terhadap nilai pendidikan. Fasilitas yang baik menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang dapat membentuk persepsi siswa terhadap nilai pendidikan sebagai investasi masa depan yang bernilai. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk merencanakan dan melibatkan diri dalam perjalanan pendidikan yang lebih panjang. Namun di sisi lain, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dapat merendahkan harapan lama sekolah siswa. Ketidakpastian mengenai kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan dapat menciptakan rasa tidak yakin akan nilai pendidikan, mengurangi motivasi untuk bertahan lebih lama di sekolah, atau bahkan mengejar pendidikan setinggi mungkin.

Dengan memperhatikan indeks fasilitas pendidikan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan harapan lama sekolah. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kualitas pengajaran dapat menjadi langkah-langkah penting untuk memupuk harapan dan aspirasi siswa terhadap pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara harapan lama sekolah dan indeks fasilitas pendidikan menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kurangnya jumlah dan jenis fasilitas pendidikan dalam suatu wilayah dapat secara signifikan mempengaruhi harapan lama sekolah para siswa. Fasilitas pendidikan yang terbatas dapat menghambat pertumbuhan harapan lama sekolah siswa. Ketika siswa merasa terbatas dalam akses mereka terhadap fasilitas yang mendukung pembelajaran, harapan mereka untuk melanjutkan pendidikan mungkin menjadi terbatas pula. Fasilitas pendidikan yang minim atau tidak memadai dapat mengurangi rasa inspirasi dan motivasi siswa untuk meraih tujuan pendidikan jangka panjang. Ketidakmampuan menyediakan lingkungan belajar yang optimal dapat merugikan perkembangan aspirasi siswa. Kurangnya fasilitas pendidikan dapat

meningkatkan risiko siswa putus sekolah karena mereka mungkin merasa sulit untuk melihat nilai dan manfaat jangka panjang dari pendidikan. Ini dapat menciptakan kesenjangan antara harapan siswa dan kenyataan yang dihadapi di lingkungan pendidikan. Wilayah dengan fasilitas pendidikan yang kurang lengkap dapat mengalami ketidaksetaraan dalam harapan lama sekolah antar siswa. Siswa di wilayah tersebut mungkin memiliki harapan yang lebih rendah karena terbatasnya fasilitas pendidikan yang dapat memotivasi mereka untuk meraih prestasi lebih tinggi. Kurangnya fasilitas, seperti perpustakaan yang kurang lengkap atau laboratorium yang terbatas, dapat mempengaruhi kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Siswa akan kurang siap menghadapi tuntutan akademis dan persaingan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengatasi kurangnya fasilitas pendidikan memerlukan perhatian serius terhadap investasi dalam infrastruktur pendidikan, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kualitas pengajaran. Upaya ini dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang memotivasi dan mendorong harapan lama sekolah, memberikan setiap siswa kesempatan yang setara untuk meraih potensinya.

#### JUMLAH DAN JENIS FASILITAS PENDIDIKAN PADA 8 KECAMATAN (KUADRAN III)

| KECAMATAN          | Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit) |           |            |            |           |           |           |           |           |          | Jumlah Total | Jumlah Jenis |
|--------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|
|                    | TK                                 | RA/BA     | SD         | MI         | SMP       | MTs       | SMA       | MA        | SMK       | PT       |              |              |
| JASINGA            | 10                                 | 4         | 62         | 8          | 15        | 4         | 2         | 1         | 4         | 0        | 110          | 9            |
| TENJOLAYA          | 15                                 | 8         | 25         | 17         | 14        | 5         | 5         | 4         | 6         | 0        | 99           | 9            |
| SUKAMAKMUR         | 4                                  | 4         | 30         | 24         | 8         | 16        | 4         | 3         | 4         | 0        | 97           | 9            |
| CIJERUK            | 6                                  | 7         | 42         | 8          | 9         | 12        | 1         | 3         | 8         | 0        | 96           | 9            |
| TENJO              | 2                                  | 0         | 35         | 12         | 13        | 7         | 4         | 3         | 5         | 0        | 81           | 8            |
| RANCA BUNGUR       | 13                                 | 4         | 25         | 7          | 12        | 5         | 2         | 2         | 8         | 1        | 79           | 10           |
| TANJUNGSARI        | 4                                  | 10        | 26         | 15         | 9         | 3         | 3         | 1         | 3         | 0        | 74           | 9            |
| SUKAJAYA           | 1                                  | 0         | 29         | 13         | 9         | 8         | 2         | 1         | 5         | 0        | 68           | 8            |
| <b>Grand Total</b> | <b>55</b>                          | <b>37</b> | <b>274</b> | <b>104</b> | <b>89</b> | <b>60</b> | <b>23</b> | <b>18</b> | <b>43</b> | <b>1</b> | <b>704</b>   | <b>10</b>    |

Keterangan:

RA/BA = Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (setara TK)

MI = Madrasah Ibtidaiyah (setara SD)

MTs = Madrasah Tsanawiyah (setara SMP)

MA = Madrasah Aliyah (setara SMA)



Sumber: Data Diolah, 2024

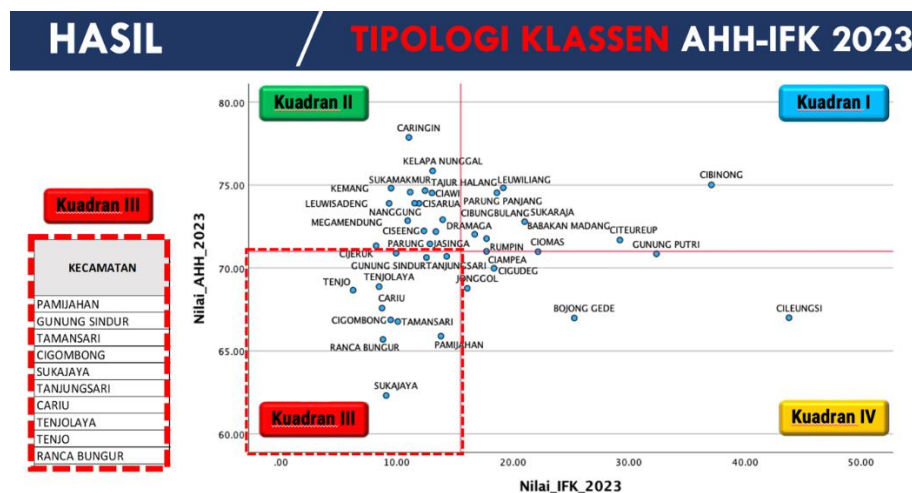
**Gambar 9.** Jumlah dan Jenis Fasilitas Pendidikan Pada 8 Kecamatan (Kuadran III)

### 3.4. Tipologi Klassen untuk AHH-IFK Kabupaten Bogor Tahun 2023

Analisis tipologi wilayah dengan menggunakan tipologi Klassen pada variable AHH dengan IFK digunakan untuk mengkategorisasikan unit-unit wilayah (level kecamatan) untuk memudahkan pencirian wilayah-wilayah mana saja di Kabupaten Bogor yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan intervensi kebijakan terkait bidang kesehatan, yaitu wilayah-wilayah yang cenderung memiliki nilai AHH rendah (dibawah rata-rata agregat) dan nilai IFK rendah (dibawah rata-rata agregat). Berdasarkan gambar tipologi Klassen HLS-IFP tahun 2023 didapatkan bahwa Kecamatan-Kecamatan yang berada pada kuadran I, II, III, dan IV yaitu sebagai berikut:

- Kuadran I menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai AHH diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFK diatas rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Cibinong, Gunung Putri, Bojong Gede, Babakan Madang, Leuwiliang,

- Cibungbulang, Rumpin, dan Parung Panjang.
- Kuadran II menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai AHH diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFK dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Jasinga, Nanggung, Leuwisadeng, Ciseeng, Parung, Tajurhalang, Kemang, Dramaga, Cijeruk, Caringin, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Kelapanunggal, Sukamakmur.
  - Kuadran III menunjukan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai AHH dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFK dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Cariu, Tanjungsari, Cigombong, Tamansari, Tenjolaya, Pamijahan, Rancabungur, Gunungsindur, Tenjo, dan Sukajaya.
  - Kuadran IV menunjukan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai AHH dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFK diatas rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Cigudeg, Ciampea, Cileungsi, Jonggol.



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 10.** Tipologi Klassen AHH dengan IFK tahun 2023

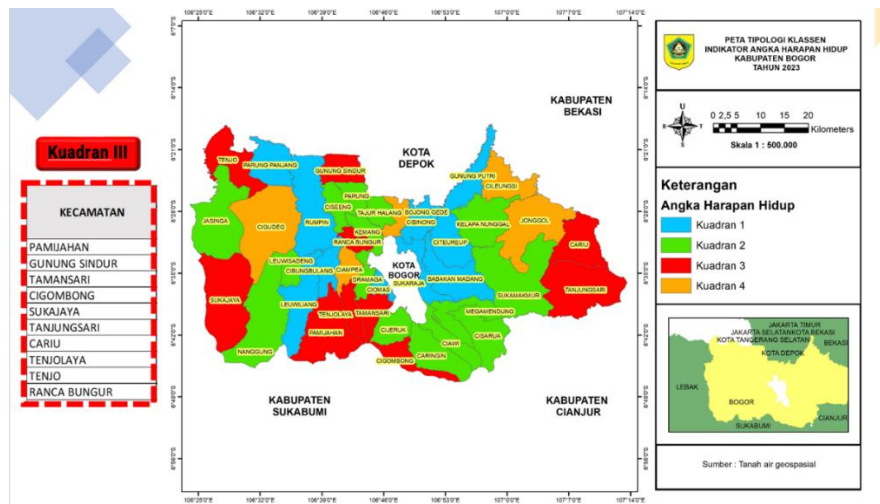
Usia harapan hidup memiliki kaitan yang erat dengan indeks fasilitas kesehatan, di mana kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan dapat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang baik, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan sarana medis lainnya, dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan memperbaiki perawatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, indeks fasilitas kesehatan yang tinggi dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan usia harapan hidup, menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas.

Indeks fasilitas kesehatan yang baik tidak hanya mempengaruhi usia harapan hidup secara langsung melalui pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang lengkap dapat mendukung program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan deteksi dini penyakit, sehingga membantu mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan.

Selain itu, indeks fasilitas kesehatan yang tinggi dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang mendukung gaya hidup sehat. Adanya fasilitas olahraga, ruang terbuka, dan program promosi kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup aktif



dan mengurangi faktor risiko penyakit. Hal ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan, akhirnya, usia harapan hidup yang lebih panjang.



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 11.** Pemetaan Tipologi Kelas AHH dengan IFK tahun 2023

Usia harapan hidup berkaitan erat dan dipengaruhi oleh indeks fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan memainkan peran krusial dalam peningkatan kualitas hidup dan pencegahan penyakit.

#### JUMLAH DAN JENIS FASILITAS KESEHATAN PADA 10 KECAMATAN (KUADRAN III)

| KECAMATAN          | Jumlah Fasilitas Kesehatan (unit) |          |           |           |           |            |           |            |           |           |            |           | Jumlah Total | Jumlah Jenis |
|--------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|
|                    | RS                                | RSB      | PI        | PTI       | Toko Jamu | Posyandu   | Pustu     | Poliklinik | Dokter    | RB        | Bidan      | Poskesdes | Polindes     | Apotek       |
| PAMIJAHAN          | 0                                 | 0        | 1         | 3         | 9         | 145        | 4         | 4          | 13        | 0         | 24         | 1         | 0            | 4            |
| GUNUNG SINDUR      | 1                                 | 0        | 1         | 1         | 12        | 103        | 3         | 5          | 19        | 3         | 17         | 1         | 0            | 10           |
| TAMANSARI          | 0                                 | 0        | 0         | 3         | 23        | 108        | 1         | 7          | 9         | 1         | 21         | 1         | 0            | 1            |
| CIGOMBONG          | 0                                 | 0        | 1         | 1         | 8         | 108        | 1         | 7          | 9         | 2         | 29         | 0         | 0            | 3            |
| SUKAJAYA           | 0                                 | 0        | 1         | 1         | 0         | 111        | 4         | 2          | 1         | 2         | 21         | 1         | 0            | 0            |
| TANJUNGSARI        | 0                                 | 0        | 1         | 1         | 0         | 91         | 5         | 1          | 3         | 1         | 16         | 2         | 3            | 2            |
| CARIU              | 0                                 | 0        | 1         | 2         | 6         | 67         | 2         | 5          | 5         | 0         | 19         | 1         | 0            | 3            |
| TENJOLAYA          | 0                                 | 0        | 1         | 1         | 5         | 72         | 1         | 6          | 3         | 4         | 12         | 2         | 0            | 4            |
| TENJO              | 0                                 | 0        | 1         | 1         | 0         | 85         | 4         | 0          | 1         | 0         | 9          | 0         | 0            | 1            |
| RANCA BUNGUR       | 0                                 | 0        | 2         | 1         | 4         | 58         | 2         | 5          | 6         | 0         | 6          | 1         | 0            | 5            |
| <b>Grand Total</b> | <b>1</b>                          | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>15</b> | <b>67</b> | <b>948</b> | <b>27</b> | <b>42</b>  | <b>69</b> | <b>13</b> | <b>174</b> | <b>10</b> | <b>3</b>     | <b>1412</b>  |

**Keterangan:**  
 RS = Rumah Sakit  
 RSB = Rumah Sakit Bersalin  
 PI = Puskesmas Inap  
 PTI = Puskesmas Tidak Inap  
 Pustu = Puskesmas Pembantu  
 RB = Rumah Bersalin



Sumber: Data Diolah, 2024

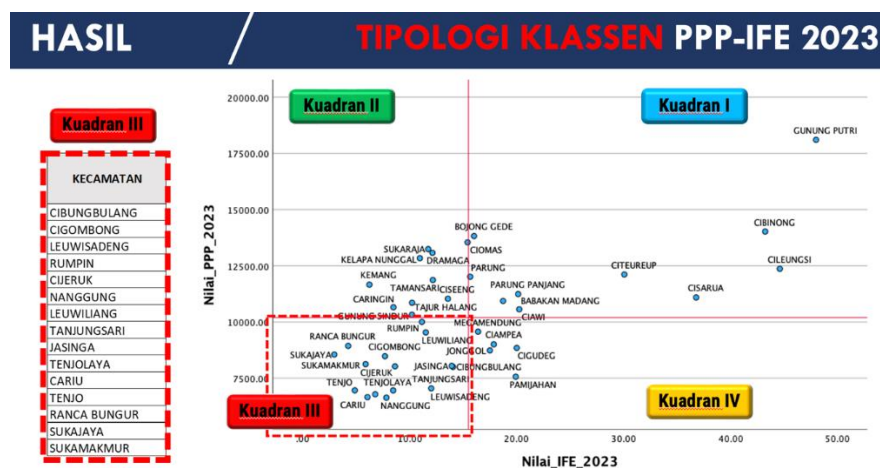
**Gambar 12.** Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan Pada 10 Kecamatan (Kuadran III)

Kurangnya jumlah dan jenis fasilitas kesehatan dalam suatu wilayah dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat mengakibatkan akses terbatas masyarakat terhadap perawatan medis. Hal ini dapat menyulitkan penduduk untuk mendapatkan pemeriksaan rutin, perawatan mendesak, atau perawatan jangka panjang yang mungkin diperlukan. Fasilitas kesehatan yang kurang dapat mempercepat penyebaran penyakit, terutama jika tidak ada langkah-langkah pencegahan dan kontrol yang efektif. Ini dapat mengakibatkan wabah penyakit dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketersediaan fasilitas kesehatan maternal dan pediatrik yang kurang dapat meningkatkan risiko



kematian ibu dan anak. Pelayanan kehamilan, persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir menjadi sulit diakses, yang dapat berdampak pada kesehatan perempuan dan bayi. Mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan memerlukan komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, menyediakan pelatihan bagi tenaga medis, dan mendukung program pencegahan penyakit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kesehatan yang lebih merata, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### 3.5. Tipologi Klassen untuk PPP-IFE Kabupaten Bogor Tahun 2023



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 13.** Tipologi Klassen PPP dengan IFE tahun 2023

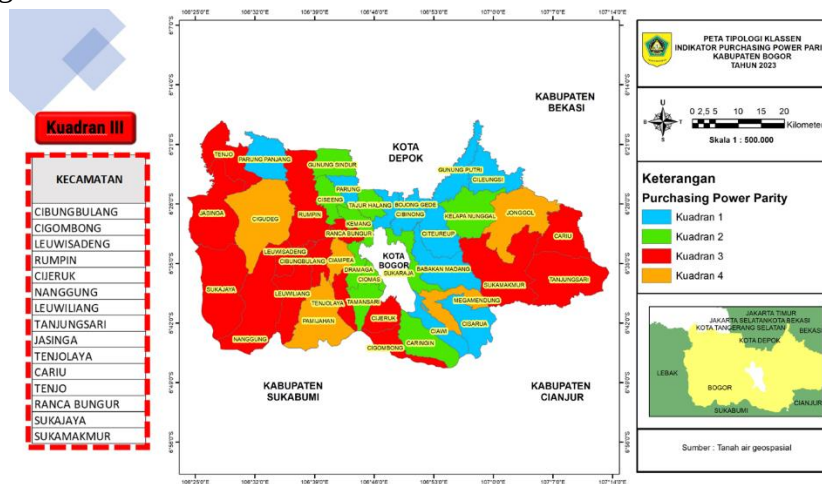
Analisis tipologi wilayah dengan menggunakan tipologi Klassen pada variable PPP dengan IFE digunakan untuk mengkategorisasikan unit-unit wilayah (level kecamatan) untuk memudahkan pencirian wilayah-wilayah mana saja di Kabupaten Bogor yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan intervensi kebijakan terkait bidang ekonomi, yaitu wilayah-wilayah yang cenderung memiliki nilai PPP rendah (dibawah rata-rata agregat) dan nilai IFE rendah (dibawah rata-rata agregat). Berdasarkan gambar tipologi Klassen PPP-IFE tahun 2023 didapatkan bahwa kecamatan-kecamatan yang berada pada kuadran I, II, III, dan IV yaitu sebagai berikut:

- Kuadran I menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai PPP diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFE diatas rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Parung Panjang, Parung, Cibinong, Bojong Gede, Gunung Putri, Cileungsi, Citeureup, Babakan Madang, Cisarua, Ciawi.
- Kuadran II menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai PPP diatas rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFE dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Gunung Sindur, Ciseeng, Tajurhalang, Kemang, Dramaga, Ciomas, Caringin, Kelapa Nunggal.
- Kuadran III menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai PPP dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFE dibawah rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Tenjo, Jasinga, Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng,

Cibungbulang, Rumpin, Rancabungur, Tenjolaya, Cijeruk, Cigombong, Cariu, Tanjungsari, Sukamakmur.

- d. Kuadran IV menunjukkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki nilai PPP dibawah rata-rata Kabupaten Bogor dengan nilai IFE diatas rata-rata Kabupaten Bogor yaitu diantaranya: Cigudeg, Pamijahan, Ciampea, Megamendung, Jonggol.

Purchasing Power Parity (PPP) memiliki kaitan yang signifikan dengan indeks fasilitas ekonomi. Tingkat daya beli, sebagaimana diukur oleh PPP, mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengakses fasilitas ekonomi. Wilayah dengan PPP yang rendah (kuadran III) cenderung memiliki masyarakat yang kurang mampu secara finansial, yang pada gilirannya dapat menciptakan kondisi untuk pengembangan fasilitas ekonomi yang lebih baik, seperti infrastruktur dan layanan ekonomi. PPP yang rendah dapat menciptakan tantangan dalam meningkatkan indeks fasilitas ekonomi, karena masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan layanan dan peluang ekonomi yang tersedia.



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 14.** Pemetaan Tipologi Klassen PPP dengan IFE tahun 2023

Dampak Purchasing Power Parity (PPP) terhadap indeks fasilitas ekonomi juga dapat dilihat dari perspektif investasi dan pengembangan sektor ekonomi. PPP yang tinggi dapat menarik investasi asing dan domestik, menciptakan peluang untuk pengembangan infrastruktur yang lebih modern dan efisien. Ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas ekonomi seperti yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, PPP yang rendah dapat menjadi hambatan untuk investasi dan pengembangan ekonomi. Kurangnya daya beli masyarakat dapat menghambat pertumbuhan sektor usaha, mengurangi daya saing wilayah tersebut, dan mempengaruhi ketersediaan serta kualitas fasilitas ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan PPP juga seharusnya mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan indeks fasilitas ekonomi. Dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung dan memperkuat daya beli masyarakat di kecamatan-kecamatan yang berada di kuadran III, dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas

ekonomi yang ada. Ini menciptakan keseimbangan yang positif antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### JUMLAH DAN JENIS FASILITAS EKONOMI PADA 15 KECAMATAN (KUADRAN III)

| KECAMATAN    | Jumlah Fasilitas Ekonomi (unit) |       |      |             |            |           |             |        |       |           |            |     |     |                 |        |          |     |     |    | Jumlah Total | Jumlah Jenis |            |
|--------------|---------------------------------|-------|------|-------------|------------|-----------|-------------|--------|-------|-----------|------------|-----|-----|-----------------|--------|----------|-----|-----|----|--------------|--------------|------------|
|              | Kelompok                        | Wungu | UMKM | Mini market | Pertoko an | Resto ran | Pengi napan | BUMDes | Hotel | Bank Pmrt | Bank Swsta | BPR | KUD | Koperasi kredit | Kospin | Koperasi | PTB | PTP | PP |              |              | Pasar Desa |
| CIBUNGBULANG | 1579                            | 517   | 317  | 27          | 10         | 9         | 3           | 17     | 0     | 4         | 0          | 2   | 1   | 1               | 6      | 0        | 0   | 1   | 0  | 0            | 2494         | 14         |
| CIGOMBONG    | 1447                            | 77    | 279  | 20          | 7          | 17        | 12          | 9      | 2     | 3         | 0          | 1   | 0   | 0               | 1      | 1        | 0   | 0   | 1  | 0            | 1877         | 14         |
| LEUWISADENG  | 1571                            | 79    | 66   | 9           | 38         | 13        | 1           | 5      | 0     | 0         | 2          | 0   | 0   | 0               | 9      | 1        | 0   | 0   | 1  | 1            | 1795         | 12         |
| RUMPIN       | 284                             | 106   | 1264 | 15          | 11         | 0         | 0           | 14     | 0     | 1         | 0          | 0   | 0   | 0               | 0      | 0        | 0   | 0   | 3  | 2            | 1700         | 9          |
| CIJERUK      | 567                             | 98    | 968  | 12          | 5          | 18        | 11          | 8      | 0     | 0         | 0          | 0   | 0   | 0               | 3      | 0        | 0   | 0   | 2  | 1            | 1693         | 11         |
| NANGGUNG     | 1094                            | 265   | 98   | 11          | 2          | 2         | 10          | 12     | 0     | 0         | 0          | 0   | 0   | 1               | 0      | 1        | 1   | 0   | 1  | 0            | 1499         | 13         |
| LEUWILANG    | 1028                            | 140   | 69   | 19          | 9          | 2         | 0           | 11     | 0     | 7         | 4          | 4   | 0   | 0               | 1      | 0        | 2   | 1   | 1  | 1            | 1299         | 15         |
| TANJUNGSARI  | 414                             | 653   | 79   | 8           | 1          | 2         | 1           | 10     | 0     | 0         | 0          | 0   | 0   | 0               | 2      | 0        | 4   | 3   | 1  | 4            | 1182         | 13         |
| JASINGA      | 823                             | 86    | 42   | 15          | 5          | 14        | 3           | 18     | 0     | 1         | 0          | 0   | 0   | 8               | 0      | 0        | 3   | 1   | 5  | 0            | 1024         | 13         |
| TENJOLAYA    | 526                             | 55    | 103  | 6           | 7          | 16        | 29          | 7      | 0     | 1         | 1          | 0   | 1   | 0               | 2      | 0        | 0   | 1   | 2  | 0            | 757          | 14         |
| CARIU        | 385                             | 60    | 133  | 11          | 8          | 14        | 2           | 7      | 1     | 2         | 0          | 1   | 0   | 0               | 2      | 0        | 1   | 0   | 1  | 1            | 629          | 15         |
| TENJO        | 299                             | 254   | 49   | 5           | 0          | 9         | 0           | 8      | 0     | 0         | 0          | 0   | 0   | 0               | 0      | 2        | 1   | 1   | 0  | 0            | 628          | 9          |
| BANCA BUNGUR | 430                             | 64    | 39   | 8           | 10         | 8         | 0           | 7      | 0     | 1         | 0          | 0   | 0   | 0               | 0      | 1        | 0   | 0   | 2  | 0            | 570          | 10         |
| SUKAJAYA     | 331                             | 89    | 20   | 2           | 1          | 0         | 0           | 11     | 0     | 0         | 0          | 0   | 0   | 0               | 0      | 0        | 0   | 0   | 0  | 0            | 454          | 6          |
| SUKAMAKMUR   | 44                              | 70    | 185  | 5           | 2          | 14        | 8           | 12     | 1     | 0         | 1          | 0   | 0   | 0               | 0      | 0        | 0   | 1   | 1  | 1            | 345          | 13         |
| Grand Total  | 10822                           | 2613  | 3711 | 173         | 116        | 138       | 80          | 156    | 4     | 20        | 8          | 8   | 3   | 9               | 27     | 3        | 12  | 10  | 22 | 11           | 17946        | 20         |

##### Keterangan:

BUMDes = Badan Usaha Milik Desa

Kospin = Koperasi Simpan Pinjam

PTB = Pasar Tanpa Banunan

PTP = Pasar Tidak Permanen

PP = Pasar Permanen



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 15.** Jumlah dan Jenis Fasilitas Ekonomi Pada 15 Kecamatan (Kuadran III)

Kurangnya jumlah dan jenis fasilitas ekonomi di kecamatan kuadran III dapat menyebabkan sejumlah dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mengakibatkan keterbatasan peluang pekerjaan bagi penduduk setempat. Ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan memberikan dampak negatif pada taraf hidup masyarakat. Fasilitas ekonomi yang kurang dapat mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Dengan kurangnya peluang ekonomi, penduduk setempat mungkin kesulitan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Kurangnya fasilitas ekonomi juga dapat berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Ini termasuk keterbatasan dalam memperoleh pinjaman untuk usaha kecil dan menengah, sehingga menghambat perkembangan sektor bisnis lokal. Tanpa adanya fasilitas produksi dan distribusi yang memadai, sektor ekonomi lokal mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Ketidakberagaman fasilitas ekonomi dapat menyebabkan ketergantungan pada sektor tertentu, membuat wilayah tersebut rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Kurangnya diversifikasi ekonomi juga dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi dalam sektor-sektor baru. Untuk mengatasi kurangnya fasilitas ekonomi, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur, dukungan untuk pelaku usaha lokal, dan kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi.

## 4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor Barat, memiliki nilai komponen IPM yang lebih rendah dibandingkan wilayah Kabupaten Bogor Timur, terutama komponen PPP. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor memerlukan intervensi khusus karena berbagai indikator pembangunan yang berada di bawah rata-rata. Terdapat 10 kecamatan diantaranya Tenjo, Cariu, Tenjolaya, Nanggung, Jasinga, Cijeruk, Leuwisadeng, Tanjungsari, Sukajaya, dan Sukamakmur memiliki

nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Kecamatan (IPK) yang rendah. Selain itu, 15 kecamatan diantaranya Tenjo, Cariu, Tenjolaya, Jasinga, Cijeruk, Tanjungsari, Sukajaya, Rancabungur, Tamansari, Cisarua, Dramaga, Kelapanunggal, Rumpin, Babakan Madang, dan Sukamakmur juga menunjukkan rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Fasilitas Pendidikan (IFP). Tujuh kecamatan diantaranya Jasinga, Tanjungsari, Tenjo, Rancabungur, Cijeruk, dan Sukamakmur memiliki Harapan Lama Sekolah (HLS) dan IFP yang rendah, sementara Cariu, Tanjungsari, Cigombong, Tamansari, Pamijahan, Rancabungur, Gunungsindur, dan Sukajaya menghadapi masalah dalam Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Fasilitas Kesehatan (IFK). Terakhir, 15 kecamatan diantaranya Tenjo, Jasinga, Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Rumpin, Cijeruk, Cigombong, dan Cariu memiliki *Purchasing Power Parity* (PPP) dan Indeks Fasilitas Ekonomi (IFE) yang rendah, sehingga memerlukan intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut. Penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di kecamatan dengan nilai rendah dan membandingkan dengan kabupaten serupa untuk menemukan kebijakan yang efektif. Selain itu, disarankan untuk melakukan penelitian kualitatif untuk memahami tantangan dan kebutuhan spesifik masyarakat, serta menggunakan pendekatan multidisiplin untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan di setiap kecamatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (1977). Problems of defining religion. *International Social Science Journal*, 29(2).
- Benería, L., Berik, G., & Floro, M. S. (2016). *Paid and unpaid work: meanings and debates. Gender, Development and Globalization: Economics as if All People Mattered*. New York: Routledge.
- Firdamayanti, & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Ketimpangan Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019. *INDEPENDENT :Journal Of Economics*, 1(2), 109–123.
- Lumbantoruan, E. P., & Hidayat, P. (2014). Analisis pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi-provinsi di Indonesia (metode kointegrasi). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 14–27.
- Muzdalifa, D. N., & Haryatiningsih, R. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia. In *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 1–8.
- Nadia, S. P., & Riyanto, W. H. (2023). Analisis Tipologi Klassen Pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(1), 30–40.
- Sen, A. (1999). Supersymmetric world-volume action for non-BPS D-branes. *Journal of High Energy Physics*, 1999(10), 008.
- United Nation Development Programe. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Berbagai Negara*. Jakarta : UNDP – PBB.
- United Nation Development Programe. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Berbagai Negara*. Jakarta : UNDP – PBB.